



DITERIMA DARI Pihak Terkait	
NOMOR	07-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
WAKTU	: 20 menit
TANGGAL	: 5 Juli 2019
WAKTU	: 15.58



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**TAHUN 2019**

**KETERANGAN PKS SEBAGAI**

**PIHAK TERKAIT**

**Provinsi Papua**

**Dapil 3**

**Kota Jayapura**

**Partai Pemohon :  
Partai BERKARYA**



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,  
e-mail: [timphu.pks2019@gmail.com](mailto:timphu.pks2019@gmail.com)  
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 05 Juli 2019

Hai : **Keterangan Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Pihak Terkait Terhadap  
Perkara Nomor 207-07-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan  
oleh Pemohon Partai Politik BERKARYA**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : Mohamad Sohibul Iman  
**Tempat/Tgl. Lahir (Umur)** : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Swasta  
**Jabatan** : Presiden Partai Keadilan Sejahtera  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Alamat** : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82  
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia  
**Nomor Telepon** : +62-21-78842116  
**Nomor Faximil** : +62-21-78846456  
**NIK** : 3276020510650014
  
2. **Nama** : Mustafa Kamal  
**Tempat/Tgl. Lahir (Umur)** : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Swasta  
**Jabatan** : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Alamat** : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

**Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia**

**Nomor Telepon** : +62-21-78842116  
**Nomor Faximil** : +62-21-78846456  
**NIK** : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Kota Jayapura Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540

19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo,S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman	8171022310690007	15.00037

	Sahupala, S.H., M.H.		
45.	Malik Raudhi Tuasamu, S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi, S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri, S.H., M.H.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari, S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H., M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 207-07-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai BERKARYA , sebagai berikut :

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai BERKARYA dengan Nomor Perkara : 207-07-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

## **II.DALAM EKSEPSI**

### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon di dalam dalil Pokok Permohonannya (*Posita*) pada halaman 15, Pemohon menyandingkan data dari hasil Rekapitulasi perolehan suara versi Termohon (DB1) dengan data Pemohon (C1) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 3.
- 2) Bahwa penyandingan Rekapitulasi hasil perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon adalah hanya untuk Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan suara setiap Partai Politik di Distrik Heram.
- 3) Bahwa dengan demikian penyandingan yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah meliputi seluruh Daerah Pemilihan 3 Kota Jayapura yang meliputi Distrik Muara Tami dan Distrik Heram.
- 4) Bahwa dapat dilihat dengan seksama pada *Petitum* Pemohon, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan suara

Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 3.

- 5) Bahwa sebagaimana diketahui, Kota Jayapura Daerah Pemilihan 3 meliputi Distrik Heram dan Muara Tami. namun di dalam Petitemnya Pemohon memohon agar majelis Hakim Menetapkan Perolehan Suara setiap Partai Politik untuk pengisian anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 3 hanya berdasarkan perolehan suara dari Distrik Heram.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya Permohonan dari Pemohon oleh Majelis Hakim dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan pada perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 3 Khusus Distrik Heram , menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya telah terjadi penambahan suara pada hampir semua partai secara signifikan pada dokumen DB1 menyebabkan rangking perolehan kursi pemohon yang awalnya menempati posisi ke 7 menjadi posisi ke 13. (hal.22)
2. Bahwa dalil pemohon tersebut menunjukkan tentang penyandingan data dari Termohon (KPU) yaitu DB-1 dengan data yang dimiliki Pemohon yaitu Form C1.
3. Bahwa kaitannya dengan data berupa Form DB-1 yang menjadi pembanding data Pemohon (Form C1), Pihak Terkait juga memiliki Form DB-1(*Bukti PT-1*) karena Saat Rapat Pleno KPUD tingkat Kota Jayapura, saksi masing-masing Parpol menerimanya.
4. Bahwa terdapat ketidaksesuaian data Pembanding (Form DB1) yang ditampilkan oleh Pemohon dengan yang dimiliki oleh Pihak Terkait. (*Bukti PT-2*).

## KHUSUS DISTRIK HERAM

No.	PARPOL	Perolehan Suara sesuai DB1	
		Versi Pihak Terkait	Versi Pemohon
1.	PKB	2811	2637
2.	GERINDRA	2178	2015
3.	PDIP	4792	4076
4.	GOLKAR	3273	2868
5.	NASDEM	3562	3042
6.	GARUDA	1383	913
7.	BERKARYA	2307	2544
8.	PKS	2491	1608
9.	PERINDO	4785	3299
10.	PPP	1698	1316
11.	PSI	3394	2898
12.	PAN	2521	2006
13.	HANURA	2913	2121
14.	DEMOKRAT	2854	2469
19.	PBB	1387	755
20.	PKPI	2513	2472

5. Bahwa tampak pada tabel di atas adanya perbedaan perolehan suara semua partai yang ditampilkan oleh Termohon dan Pihak terkait meskipun sama-sama mengacu kepada dokumen yang sama yaitu DB1.
6. Bahwa dengan adanya perbedaan data tentang perolehan suara setiap Parpol meskipun dari sumber yang sama, maka patut diduga data yang disajikan oleh Pemohon bukanlah data yang bersumber dari DB1, sehingga kebenarannya harus diragukan.
7. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang terungkap, maka Majelis Hakim terhadap Permohonan Pemohon harus menolaknya.

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomo 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 , bertanggal 21Mei 2019 **sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 3.**
3. Menetapkan perolehan suara termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

### 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA

#### KOTA JAYAPURA

#### DAPIL 3 (Distrik Muara Tami dan Distrik Heram)

No	PARPOL	DISTRIK		JUMLAH
		MUARA TAMI	HERAM	
1.	PKB	449	2811	3260
2.	GERINDRA	552	2178	2730
3.	PDIP	1105	4792	5897
4.	GOLKAR	1214	3273	4487
5.	NASDEM	510	3562	4072
6.	GARUDA	48	1383	1431
7.	BERKARYA	272	2307	2579
8.	<b>PKS</b>	<b>1312</b>	<b>2491</b>	<b>3803</b>
9.	PERINDO	330	4785	5115
10.	PPP	415	1698	2113
11.	PSI	319	3394	3713
12.	PAN	366	2521	2887
13.	HANURA	346	2913	3259
14.	DEMOKRAT	434	2854	3288
19.	PBB	75	1387	1462
20.	PKPI	80	2513	2593

**3.1.2. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 3**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Jayapura	Perolehan Suara
1.	NAFTALI JACOBUS ICK, SE (PDIP)	969
2.	TAMAR SAPAN, SE (PERINDO)	1616
3.	YOAN ALFREDO WAMBITMAN, ST (GOLKAR)	1063
4.	STANIS HIKE, SH (NASDEM)	1117
5.	LINA MARLINA, ST (PKS)	1266
6.	ISMAIL LADOPURAB, SE (PSI)	1019
7.	MALIANA BEMBOK, SE (DEMOKRAT)	835
8.	ANDI SUDIRMAN, ST (PKB)	1086

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum



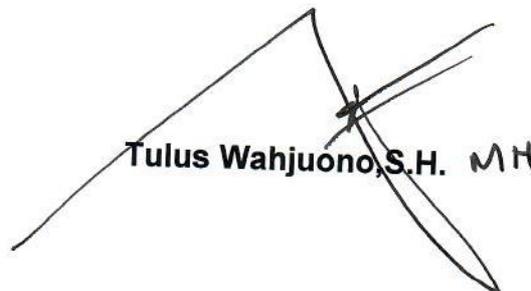
Anton Aryadi, S.H.



Aristya Kusuma Dewi, S.H.



Imam Sutopo, S.H.



Tulus Wahjuono, S.H. MH